

MUNGKINKAH PENDIDIKAN GRATIS?

Oleh R Wakhid Akhdinirwanto

Belum tuntas silang pendapat tentang ujian nasional (UN), kali ini masyarakat kita disuguhi program baru pemerintah berupa pendidikan gratis. Dan memang sudah bukan rahasia lagi kalau sistem pendidikan kita sarat dengan permasalahan, satu masalah belum selesai, muncul masalah lain yang menarik banyak energi dari masyarakat.

Masalah pendidikan gratis ini terus bergulir dan menjadi pembicaraan yang serius di masyarakat, seiring dengan kenaikan BBM. Bahkan sejumlah pihak mengatakan, sepertinya pendidikan formal kita saat ini akan mendapat durian runtuh, yaitu mendapat dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pemerintah terus-menerus mengkampanyekan pendidikan gratis, dengan dialihkannya sebagian subsidi BBM ke pembiayaan pendidikan, maka pendidikan dasar akan dinikmati rakyat secara gratis (Kompas, 21 Maret 2005). Silang pendapat pun tak terelakkan, mulai dari sekadar nama (pendidikan gratis atau sekolah gratis) sampai pada benar atau tidak realisasinya di masyarakat nantinya. Terlepas dari itu semua, marilah kita cermati bersama. Mungkinkah pendidikan di negara kita gratis?

Semua orang tentu menginginkan memperoleh pendidikan formal yang berkualitas, sudah barang tentu dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai. Dengan fasilitas tersebut maka daya kreatif, daya inovatif, dan daya imajinatif siswa menjadi berkembang dengan baik. Pendidik (guru) akan dengan mudah melakukan pembelajaran berkualitas sehingga mampu membantu siswa mengembangkan fantasi, empati, hasrat, cita-cita, dan nyalinya sehingga terbentuklah peserta didik yang penuh *greget* dan motivasi dalam belajar. Pendek kata, potensi diri peserta didik akan berkembang secara optimal. Pendidikan semacam inilah yang banyak menjadi impian masyarakat.

Idealnya, pendidikan semacam ini bisa diakses oleh semua kalangan. Sebab negara telah menjamin penduduknya untuk memperoleh pendidikan. Dan ini menjadi tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa membedakan ras, suku, maupun agama yang dianutnya.

Sayang pendidikan berkualitas di negara kita hanya bisa diakses oleh golongan menengah ke atas. Mereka yang berkantong tebal sajalah yang mampu mengakses pendidikan berkualitas tersebut. Berapapun jumlah rupiah yang harus dibayarkan, mereka sanggup membayarnya, asalkan anak atau anggota keluarganya bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Sedang bagi golongan menengah ke bawah alias golongan miskin tidak mampu mendapatkannya. Mereka cukup menjadi penonton terhadap hingar bingarnya pendidikan berkualitas. Sebab mereka selalu terbentur oleh biaya pendidikan yang semakin tinggi yang tidak mungkin dapat dijangkaunya. Beruntung mereka masih bisa sekolah di sekolah-sekolah yang memang “dikhususkan” untuk kelompok miskin, meski sudah dibebaskan untuk membayar SPP, tapi masih juga ada pembayaran untuk keperluan lain. Pendek kata, dalih untuk memungut sumbangan kepada siswa selalu saja ada, karena memang bisa dicari-cari alasannya. Jadi pendidikan gratis tanpa pungutan dana yang pernah digembar-gemborkan beberapa waktu lalu belum menjadi kenyataan. Yang terjadi justru munculnya diskriminasi sekolah berdasarkan status sosial, yaitu sekolah kaya dan sekolah miskin. Maksudnya sekolah untuk orang-orang yang mampu secara finansial (kaya) dan sekolah untuk orang-orang yang tidak mampu secara finansial (miskin).

Sekarang, dengan kenaikan harga BBM pemerintah memprogramkan pendidikan gratis. Program ini ditempuh untuk meringankan pendidikan rakyat miskin. Dengan suntikan dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 5,6 triliun yang diperuntukkan bagi 9,6 juta siswa miskin, diharapkan mereka dapat menikmati pendidikan dasar.

Menurut Departemen Komunikasi dan Informatika dana sebesar itu akan dialokasikan dalam bentuk beasiswa untuk siswa SD/MI Rp 300.000 per tahun dan anak putus sekolah Rp 500.000 per tahun, siswa SMP/MTs mendapat Rp 780.000 per tahun dan anak putus sekolah sebesar Rp 1000.000 per tahun. Sementara siswa SMK/SMA/MA mendapat Rp 1.440.000 per tahun dan siswa putus sekolah sebesar Rp 2 juta per tahun (Kompas, 28 Maret 2005). Sepintas dana ini memang besar bagi siswa. Tapi benarkah dana tersebut mencukupi kebutuhan siswa dalam menempuh pendidikan formal? Mari kita cermati lebih jauh.

Berbicara soal pembiayaan pendidikan sejatinya juga berbicara mengenai pembiayaan yang mesti dikeluarkan anak berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman semacam ini sangat diperlukan agar dalam menyusun perencanaan pendidikan dapat secara tepat mengetahui beban yang harus dipikul kelompok miskin.

Dilihat dari substansinya, biaya pendidikan menurut H Yanes (1985) dikategorikan dalam *private cost*. *Private cost* ini terdiri dari dua jenis yaitu *monetary cost*, yang berkaitan dengan biaya langsung maupun tidak langsung, dan *non-monetary cost*, yang berkaitan dengan seluruh pengorbanan di luar dana yang mesti dikeluarkan orangtua atau anak dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikannya (Kompas, 11 April 2005).

Dari sisi *monetary cost* ada baiknya kalau kita simak uraian Benni Setiawan tentang subsidi pendidikan (Kompas, 28 Maret 2005). Jika seorang siswa SD mendapat kompensasi pendidikan sebesar Rp 300.000 per tahun, maka akan dapat dilihat penggunaan uang tersebut selama satu tahun. Misalnya, pengeluaran SPP perbulan Rp 5.000 x 12 = Rp 60.000. Pembelian buku dan alat tulis selama setahun, 1 buku tulis Rp 2.000 x 6 mata pelajaran x 2 (semester) = Rp 24.000; 2 pensil/ballpoint x Rp 1.200 x 2 = Rp 4.800. Jumlah keseluruhan adalah Rp 88.000. Itu belum untuk keperluan pembelian buku-buku paket/Lembar Kerja Siswa (LKS), uang saku, dan lain-lain.

Kalau kebetulan rumahnya jauh dan harus ditempuh dengan alat transportasi, maka dibutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit. Untuk keperluan transportasi, misalnya diperlukan Rp 2.000 setiap hari pergi pulang (PP), maka dalam setiap bulan seorang siswa membutuhkan biaya transportasi sebesar Rp 54.000 (jika hari efektif sekolah 26 hari setiap bulan). Dengan demikian dalam setahun (10 bulan efektif untuk sekolah) diperlukan Rp 540.000 untuk keperluan transportasi.

Melihat pengeluaran di atas, maka seorang siswa yang mendapat bantuan akan mengalami defisit sebesar Rp 328.000 setiap tahunnya. Ini berarti rakyat miskin akan menanggung utang untuk keperluan sekolah sebesar Rp 328.000 per tahun. Pertanyaannya, dari mana rakyat miskin dapat menutupi utang tersebut?

Rakyat miskin bisa jadi dapat hidup sederhana tanpa utang ketika harga BBM belum naik. Dengan penghasilan Rp 10.000 tiap hari, misalnya, mereka mampu hidup sederhana, bahkan mampu menyisihkan sebagian kecil hasil jerih payahnya untuk keperluan masa depannya, karena harga kebutuhan pokok dan transportasi belum naik. Namun ketika kenaikan BBM dan kemudian disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi, maka rakyat miskinlah yang menderita, meski mereka mendapat sumbangan dari kompensasi kenaikan BBM. Belum lagi masalah

kesehatan (berkaitan dengan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan) yang juga membutuhkan biaya semakin tinggi seiring dengan kenaikan BBM, yang semakin menambah ketidakberdayaan masyarakat kecil.

Memang rakyat tak mampu mendapat JPS pendidikan dan JPKM. Melalui program-program jaring pengaman (JP) ini diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat kecil. Tapi sudah menjadi rahasia umum, disamping cara mendapatkannya cukup berbelit-belit, juga sering terjadi program-program tersebut tidak tepat sasaran, baik dari segi yang berhak mendapatkan maupun dari segi waktu penggunaannya

Hal-hal semacam inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam memberikan sumbangan pendidikan kepada rakyat miskin hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bersifat langsung seperti untuk kepentingan pembayaran SPP dan kebutuhan alat-alat tulis. Jelas saja kalau perhitungannya seperti itu, bantuan pemerintah sebesar Rp 300.000 untuk anak SD dapat dikatakan lebih dari cukup. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang bersifat tidak langsung, bantuan sebesar itu jelas belum cukup. Belum lagi kalau dalam proses pendidikan terjadi penarikan dana yang bersifat insidental. Dengan demikian kenaikan BBM yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat miskin dan mendapat dukungan dari masyarakat “terdidik” yang diwakili oleh Freedom Institute-nya Aburizal Bakrie, ternyata justru membawa keterpukuran bagi rakyat miskin yang memang sudah terpuruk sejak krisis ekonomi tujuh tahun lalu.

Diperkirakan ke depan akan semakin banyak anak-anak putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, lantaran penghasilannya satu bulan saja tidak mencukupi untuk kebutuhan dasarnya yaitu sandang dan pangan. Janji-janji kesejahteraan yang saat ini dikampanyekan hanya akan menambah kepiluan rakyat miskin. Belum lagi kalau sumbangan-sumbangan yang dijanjikan pemerintah itu, ternyata tidak sampai sasaran karena dikorup oleh birokrat-birokrat tidak bertanggung jawab, tentu kepiluan rakyat miskin akan semakin mendalam.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah secepat mungkin merealisasikan kompensasi subsidi BBM ke masyarakat miskin. Hal ini perlu segera dilakukan agar anak-anak masyarakat miskin tidak mengalami putus sekolah karena kenaikan harga BBM, dan kemudian bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah. Sebab di kalangan rakyat miskin anak adalah investasi yang sangat berharga dimana tenaganya dapat dimanfaatkan untuk membantu orangtua dalam mempertahankan hidup. Jika kompensasi kenaikan BBM itu segera terealisasi dan mudah cara memperolehnya, maka janji pemerintah tentang kenaikan harga BBM akan mensejahterakan rakyat kecil segera menjadi kenyataan. Tapi jika tidak, rakyat menjadi semakin tidak percaya pada janji-janji pemerintah, dan ini tidak menguntungkan bagi pembangunan bangsa ke depan.

Wates, 16 April 2005
Penulis

Drs R Wakhid Akhdinirwanto, MSi.

Penulis: Pemerhati pendidikan, tinggal di Wonosidi Kidul RT 73/33 Wates, KP

Keterangan:

Dimuat Majalah WARTA GURU Penerbit Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Volume

VII, No 1 Juni 2006

